

ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DI SEKTOR PUBLIK: STUDI PADA PEMERINTAH DI INDONESIA

Ringgo Lufio Herdo*¹, Dwi Alpita Sari², Edi Eko Priyono³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ringgoluvio2018@gmail.com*, dwialvitas@gmail.com, edieko0006@gmail.com

Received: 28-11-2025

Revised: 14-12-2025

Approved: 24-12-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi green accounting di sektor publik di Indonesia serta memetakan objek, pola penerapan, dan kendala yang dihadapi instansi pemerintah dalam mengelola serta melaporkan biaya lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap artikel jurnal nasional yang dipublikasikan pada periode 2020–2025 dan diakses melalui Google Scholar. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga diperoleh 29 artikel yang relevan untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi green accounting di sektor publik Indonesia paling dominan diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), terutama dalam praktik pengelolaan limbah medis melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk limbah B3. Sementara itu, penerapan green accounting pada instansi publik lain seperti BUMDes, pemerintah kota, PDAM, serta pengelola tempat wisata masih belum optimal dan cenderung bersifat parsial, dengan fokus utama pada pengelolaan limbah tanpa dukungan sistem pencatatan biaya lingkungan yang terintegrasi. Simpulan, bahwa implementasi green accounting di sektor publik Indonesia masih menghadapi keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan pemahaman konseptual, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, standar akuntansi lingkungan yang lebih jelas, serta peningkatan kapasitas institusional untuk mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Green Accounting, Sektor Publik, Akuntansi Lingkungan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kepedulian global terhadap isu-isu lingkungan, perusahaan di berbagai negara tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga diharuskan untuk memperhatikan dampak aktivitas operasional mereka terhadap lingkungan. Kondisi ini mendorong penerapan prinsip-prinsip akuntansi hijau dalam praktik manajemen korporasi. Signifikansi green accounting terletak pada perannya dalam membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan, sekaligus membuka peluang peningkatan efisiensi operasional serta mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan (Putra & Sisdianto, 2024). Seiring dengan perkembangan dunia industri, isu-isu lingkungan semakin kompleks, karena praktik industri sering mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan, seperti pencemarnya air, tanah, dan udara serta munculnya ketidaksetaraan social (Yasrawan & Werastuti, 2022). Dari kesadaran ini, berbagai inisiatif multidisiplin telah muncul untuk menangani dan mencari solusi bagi masalah lingkungan, dengan salah satu pendekatan yang digunakan adalah *green accounting*. Di negara-negara maju, di mana permintaan publik sangat tinggi, *green accounting* berkembang dengan cepat, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya regulasi terkait lingkungan. Sementara itu, di Indonesia, tingkat polusi dan pengelolaan limbah belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional (Saribu et al dalam (Chairia et al., 2022).

Di Indonesia, kebutuhan untuk menerapkan Akuntansi Hijau semakin mendesak seiring dengan meningkatnya masalah kerusakan lingkungan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung

jawab sangat penting. Meskipun Akuntansi Hijau menawarkan berbagai manfaat potensial, implementasinya dalam praktik masih menghadapi sejumlah hambatan. Banyak perusahaan belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep ini, dan pasokan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini masih terbatas. Selain itu, dukungan regulasi yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat implementasi Akuntansi Hijau (Pambudi et al., 2024). Dalam hal ini, diperlukan studi komprehensif mengenai tingkat implementasi akuntansi hijau di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh entitas korporasi, serta manfaat potensial yang dapat diperoleh dari penerapan konsep ini (Putra & Sisdiyanto, 2024).

Selain sektor swasta, tuntutan penerapan green accounting juga semakin relevan dalam sektor publik, khususnya pada instansi pemerintah. Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Aktivitas operasional instansi pemerintah, seperti rumah sakit daerah, perusahaan daerah air minum, badan usaha milik desa, hingga pengelola kawasan wisata, secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan green accounting di sektor publik menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan serta transparansi pengelolaan anggaran negara dan daerah. Di Indonesia, penerapan green accounting pada sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Berbeda dengan sektor swasta yang relatif terdorong oleh tekanan pasar dan investor, sektor publik lebih bergantung pada regulasi, komitmen pemerintah, serta kapasitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, belum terdapat standar akuntansi lingkungan yang secara spesifik dan mengikat bagi seluruh instansi pemerintah, sehingga praktik pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan masih bersifat parsial dan tidak seragam. Kondisi ini menyebabkan implementasi green accounting di sektor publik cenderung berfokus pada aspek teknis pengelolaan limbah, tanpa diimbangi dengan sistem pencatatan biaya lingkungan yang terintegrasi dalam laporan keuangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi green accounting di sektor publik Indonesia masih didominasi oleh sektor kesehatan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang memiliki tingkat risiko lingkungan relatif tinggi akibat limbah medis. Sementara itu, kajian mengenai penerapan green accounting pada instansi pemerintah lainnya masih terbatas dan menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan objek penelitian, metode, serta indikator yang digunakan menyebabkan belum adanya gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan implementasi green accounting di sektor publik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian sistematis yang mampu memetakan arah, fokus, dan temuan penelitian terdahulu guna memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana green accounting telah diterapkan oleh pemerintah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori *stakeholder*

Setiap organisasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan keputusan yang diambil kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut tidak hanya terbatas pada pemilik modal, tetapi juga mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh keberadaan dan aktivitas organisasi. Teori *stakeholder*

menekankan bahwa keberlangsungan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Mardikanto (2014) menjelaskan bahwa teori pemangku kepentingan merupakan bagian dari manajemen strategis yang berperan dalam membantu organisasi mencapai keunggulan bersaing serta memperkuat relasi dengan lingkungan eksternal (Ramdhani & Prijanto, 2024).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk dalam konteks akuntansi lingkungan (Dewi, 2017). Teori ini berfokus pada interaksi antara organisasi dan masyarakat, dengan pandangan bahwa organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai, norma, dan harapan yang berlaku dalam masyarakat. Kesesuaian antara tindakan organisasi dan norma sosial diyakini dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan organisasi tersebut, sehingga legitimasi organisasi dapat terjaga (Rohim & Hardiningsih, 2022).

Green accounting

Green accounting merupakan pendekatan akuntansi yang tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga memasukkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan secara terstruktur. Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi hijau diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan (Ramdhani & Prijanto, 2024). *Green accounting*, menurut Ikhsan (2008) dan Risal et al. (2020), adalah sebagai proses pengakuan dan pelaporan biaya-biaya lingkungan yang timbul akibat aktivitas organisasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Biaya lingkungan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari dampak operasional terhadap kualitas lingkungan di sekitar organisasi. Hendratno (2016) menyatakan bahwa penerapan *green accounting* telah berkembang menjadi instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan sekaligus sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan *green accounting* tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi dan *stakeholder*, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi green accounting di sektor publik Indonesia. Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional yang diakses melalui Google Scholar dengan rentang tahun publikasi 2020–2025 guna memastikan relevansi dan kebaruan kajian. Proses pencarian dilakukan menggunakan kata kunci “green accounting”, “akuntansi lingkungan”, dan “implementasi green accounting di sektor publik”, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Artikel yang dipilih merupakan penelitian yang membahas penerapan green accounting pada instansi pemerintah di Indonesia, tersedia dalam bentuk teks lengkap, serta memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian, sementara artikel yang bersifat konseptual murni atau berfokus pada sektor swasta

tidak disertakan dalam analisis. Dari proses seleksi tersebut, diperoleh 29 artikel yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi objek penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama terkait praktik pengelolaan lingkungan dan pencatatan biaya lingkungan.

Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan dan membandingkan hasil penelitian untuk memperoleh gambaran pola implementasi, tingkat penerapan, serta kendala green accounting di berbagai instansi sektor publik. Untuk menjaga validitas hasil kajian, penelitian ini menggunakan sumber artikel yang memiliki kredibilitas akademik dan melakukan penelaahan silang antar temuan penelitian dengan berlandaskan teori stakeholder dan teori legitimasi sebagai kerangka konseptual dalam penafsiran hasil. Metode pencarian artikel dilakukan melalui basis data jurnal penelitian dan pencarian melalui internet. Basis data yang digunakan adalah Google Scholar, dengan rentang waktu dari 2020 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan dalam pengumpulan data adalah "Green Accounting" (Chairia et al., 2022). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoretis berdasarkan praktik empiris dari tinjauan literatur sebelumnya yang terkait dengan green accounting (Deswanto, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Distribusi Artikel Penelitian Berdasarkan Objek Penelitian Implementasi Green Accounting di Sektor Publik Indonesia (2020-2025)

No	Objek Penelitian	Jumlah Artikel	Presentase (%)
1	RSUD	15	51,72%
2	Polrestabes	1	3,45%
3	BUMdes	2	6,90%
4	Pemkot	1	3,45%
5	Tempat Wisata/Taman Nasional	2	6,90%
6	PDAM	1	3,45%
7	Lain-lain	6	20,69%
	Total Artikel	29	100%

Berdasarkan Tabel 1, objek penelitian yang paling dominan adalah RSUD dengan persentase sebesar 51,72%. Selanjutnya, kategori lain-lain menempati posisi kedua sebesar 20,69%. BUMDes dan Tempat Wisata/Taman Nasional menempati posisi ketiga sebesar 6,90% Sementara itu, objek penelitian seperti Polrestabes, Pemkot, dan PDAM masing-masing hanya sebesar 3,45%. Kajian mengenai implementasi green accounting di Indonesia paling dominan dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Temuan ini mengindikasikan bahwa sektor pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah menjadi perhatian utama dalam penelitian green accounting, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah medis serta pencatatan dan pengendalian biaya lingkungan. Seluruh proses operasional yang dijalankan oleh rumah sakit menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah berbahaya yang memerlukan penanganan khusus sebelum pembuangan. Limbah yang dihasilkan dari operasi rumah sakit terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat (Rohim & Hardiningsih, 2022).

Tabel 2.
**Praktik Pengolahan Limbah pada Fasilitas Kesehatan sebagai Implementasi
Green Accounting di Sektor Publik**

No	Nama Objek Penelitian	Proses Pengolahan Limbah
1	RSUD R. A. Kartini Jepara. (Rohim & Hardiningsih, 2022)	Rumah sakit ini mengolah limbah cair IPAL, Sedangkan limbah padat B3 menggunakan jasa dari pihak ketiga.
2	RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano. (Sela et al., 2019)	Limbah padat menggunakan pihak ketiga, sedangkan pengelolaan limbah cair dilakukan secara internal melalui unit khusus, yaitu Unit Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur Rumah Sakit (IPSR).
3	RSUD Dr. Haryoto Lumajang. (Mujiono, 2022)	Limbah cair menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
4	RSUD SK Lerik Kota Kupang. (Ala & Manafe, 2021)	RSUD SK Lerik limbah cair menggunakan IPAL, seluruh jenis limbah padat dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu wadah yang telah diberi label agar tidak tercampur dengan limbah lainnya.
5	RSUD Kota Padang Panjang. (Nisak, 2025)	RSUD kota Padang Panjang saat rumah sakit menggunakan pihak ketiga untuk pengelolaan limbahnya.
6	RSUD x. (Husni et al., 2022)	Bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Mitra Hijau Asia untuk pengangkutan limbah padat B3. Sedangkan limbah cair diolah IPAL
7	RSUD Kota Mataram. (Rospani & Handajani, 2024)	RSUD Kota Mataram sudah mempunyai alat sendiri dan sudah mendapatkan izin untuk mengolah limbahnya, untuk pengolahan limbah padat rumah sakit ini bekerja sama dngan pihak ketiga.
8	RSUD Namlea Kab.Buru Provinsi Maluku. (Pelupessy et al., 2021)	Proses pengelolaan limbah di rumah sakit ini melalui beberapa proses yaitu : Membuang pada tempatnya, <i>PretreatmeGret Chamber, Anaerobic Biofilter, Reaktor Biofilter, Filter Pump, Post Treatment</i> , Sinar UV, Kolam Percobaan, <i>System Colination</i> , dan <i>Output</i> .
9	RSUD H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. (Fatimah, 2024)	Rumah sakit ini mengelola sampah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan untuk sampah padat menggunakan pihak ketiga.
10	RSUD Bendan Kota Pekalongan. (Adriyana et al., 2023)	RSUD Bendan, limbah cair diolah menggunakan IPAL. Sedangkan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga.
11	RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. (Maruapey, 2022)	Pengolahan limbah medisnya dilakukan secara sistematis melalui tahapan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan. Limbah nonmedis diangkut menggunakan container dari Dinas Kebersihan Kota Sorong, sedangkan limbah medis dimusnahkan dengan incinerator dan selanjutnya ditempatkan di TPS rumah sakit.
12	Puskesmas Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. (Wahyudi et al., 2022)	Untuk limbah cair di olah menggunakan IPAL. Sedangkan limbah padat menggunakan pihak ketiga.

13	RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. (Anam & Ramlah, 2020)	Untuk RSUD Dr. Kanujoso tidak dijelaskan secara spesifik, namun RSUD Dr. Kanujoso telah menyiapkan biaya Untuk biaya pemeriksaan air limbah.
14	Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim. (Ramadhani, 2022)	Rumah sakit ini menggunakan IPAL untuk pengolahan limbah cairnya supaya dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
15	RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar. (Yenti et al., 2023)	RSUD Hanafiah mengolah limbahnya menggunakan IPAL.

Implementasi green accounting

Green accounting menghadapi tantangan dalam mengukur eksternalitas berupa biaya dan manfaat yang timbul dari kegiatan industri. Menilai dampak negatif terhadap komunitas sekitar dan kerusakan ekologi lingkungan, seperti polusi udara, limbah cair, kebocoran tangki amonia, kebocoran tangki nuklir, dan bentuk eksternalitas lainnya, tidak mudah dilakukan dengan akurat. (Chairia et al., 2022). Dari 29 artikel yang penulis kumpulkan, implementasi green accounting di sektor publik khususnya di sektor Kesehatan telah dilaksanakan dengan baik seperti pada table 2 diatas menunjukkan proses pengolahan limbah cair dan limbah limbah padat, namun ada beberapa yang belum dilaksanakan sepenuhnya seperti di Polrestabes, BUMBDes, Pemkot, Tempat Wisata, PDAM, dan lain-lain. Menurut Apriyono et al., (2023) penerapan akuntansi hijau di tempat wisata hutan mangrove di Surabaya belum optimal. Beberapa pengunjung melaporkan menemukan sampah dan kotoran di sekitar kawasan wisata yang belum dikelola dengan baik. Situasi ini menyoroti perlunya menerapkan *green accounting* sebagai cara untuk mengatasi masalah lingkungan dan menegaskan bahwa pengelolaan ekowisata belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal, artinya prinsip-prinsip konservasi lingkungan belum dipenuhi secara optimal. Salah satu hambatan dalam menerapkan akuntansi hijau adalah pemahaman yang terbatas tentang konsep tersebut dan kapasitas yang rendah untuk menerapkannya dalam praktik.

KESIMPULAN

Bahwa implementasi green accounting di sektor publik Indonesia telah mulai diterapkan namun belum merata dan belum terintegrasi secara komprehensif. Penerapan green accounting paling dominan ditemukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang umumnya telah melaksanakan pengelolaan limbah medis melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk limbah B3, meskipun pencatatan biaya lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, pada instansi publik lain seperti BUMDes, pemerintah kota, PDAM, Polrestabes, dan pengelola tempat wisata, implementasi green accounting masih bersifat parsial dan cenderung terbatas pada aspek teknis pengelolaan lingkungan tanpa didukung sistem akuntansi lingkungan yang baku. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi yang mengikat, rendahnya pemahaman konseptual, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, penyusunan standar akuntansi lingkungan khusus sektor publik, serta peningkatan komitmen dan kapasitas

institusional agar implementasi green accounting dapat meningkatkan akuntabilitas lingkungan, transparansi pengelolaan anggaran, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyana, R., Mahmudah, D. A., & Ayuningrum, A. (2023). Implementasi Green Accounting Di RSUD Bendan Kota Pekalongan. 37(1).
- Ala, H. M., & Manafe, M. W. . (2021). Analisis Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Umum SK Lerik Kota Kupang Environmental Accounting Analysis In Sk Lerik General Hospital Kupang City. VI, 31–38.
- Anam, H., & Ramlah. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. 11(2), 131–140.
- Apriyono, S., Rozani, N. R., Agustin, D. P., & Pandin, M. Y. R. (2023). Penerapan Green Accounting Dalam Pengelolaan Tempat Wisata Hutan Mangrove Di Surabaya. 3(3).
- Chairia, Ginting, J. V. B., Ramles, P., & Ginting, F. (2022). Implementasi Green Accounting (Akuntansi Lingkungan) Di Indonesia : Studi Literatur. 8, 40–49.
- Deswanto, V. (2022). Literature Review : Green Accounting Era 4 . 0 Menuju Society 5 . 0. 11(2), 42–48.
- Fatimah, N. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H . M . Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. x, 389–398.
- Husni, M., Wardani, R., Pagalung, G., & Ryketeng, M. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Rumah Sakit X di Masa Pandemi. 515–520.
- Maruapey, R. (2022). Penerapan Akuntansi Lingkungan Dan Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong Papua Barat. 8(November), 206–216.
- Mujiono, S. eka lestari. (2022). Analisis Penerapan Green Accounting Atas Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. 27. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i2.391>
- Nisak, K. K. (2025). Analisis Penerapan Green Accounting Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.
- Pambudi, S. I., Kuswinarno, M., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2024). Mewujudkan akuntabilitas lingkungan melalui penerapan green accounting. 2(12).
- Pelupessy, S. R., Junaidi, & Anwar, S. A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea (Studi Pada Rsud Namlea Kab.Buru Provinsi Maluku). 10(07), 13–22.
- Putra, B., & Sisdianto, E. (2024). Penerapan Green Accounting Dalam Mendukung. 2(12).
- Ramadhani, I. zaki. (2022). Analisis Penerapan Green Accounting Pada Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim Ditinjau Dari Kaidah Fiqh Lingkungan.
- Ramdhani, B. A., & Prijanto, B. (2024). Pengaruh Penerapan Green accounting Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Sub Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2022). 3(01), 33–43. <https://doi.org/10.58812/sak.v3.i01>
- Rohim, A. S. M., & Hardiningsih, P. (2022). Implementasi Green Accounting Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Jepara Ahmadani. 17(1), 45–53.
- Rospani, T. W. J., & Handajani, L. (2024). Analisis Penerapan Green Accounting Pada Rsud Kota Mataram Tika. 9(2), 131–146.

- Sela, A. Y., Karamoy, H., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano. 63–73.
- Wahyudi, D., Syahril, & Rusnani. (2022). Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan Green Accounting Pada Puskesmas Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. 3(1), 16–26.
- Yasrawan, K. tri, & Werastuti, D. N. (2022). Bagaimana Peran Dan Penerapan Akuntansi Hijau Di Indonesia ? 14(3), 151–161.
- Yenti, E., Saleh, S. M., & Amor, A. (2023). Green Accounting Analysis in Public and Private Hospitals. 18(2).